



BPR FORTUNA
PT BPR LUMBUNG MEKAR FORTUNA

LAPORAN TAHUNAN 2024

(AUDITED)

Kantor Pusat

Jl. Ahmad Yani, Pondok Cilegon Indah Blok. KK1 No. 9, Kota
Cilegon - Banten



PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	2
SUSUNAN PENGURUS.....	3
UMUM.....	4
LAPORAN KEUANGAN.....	16
OPINI AKUNTAN PUBLIK	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	

VISI DAN MISI

VISI

“Menjadi BPR yang sehat, aman dan handal serta mitra solusi keuangan yang terpercaya yang dapat menggerakkan kemajuan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dan Sekitarnya”.

MISI

- Menjalin hubungan yang harmonis dan memberikan keuntungan yang optimal dan berkesinambungan kepada Pemilik, Pengelola, Nasabah dan Masyarakat.
- Memberikan pelayanan yang melampaui kepuasan nasabah melalui jaringan pelayanan yang tersebar luas dan teknologi informasi terdepan serta didukung oleh sumber daya manusia yang Profesional, Cepat dan Kompeten.
- Memberikan pelayanan jasa keuangan dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, jujur, integritas dan beretika disegala aspek bisnis.
- Membangun citra yang baik dan profesional sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat demi terciptanya kepuasan pelayanan.
- Meningkatkan fungsi intermediasi perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit guna mendukung penguatan modal Bank dan peningkatan perekonomian Daerah.
- Menciptakan entrepreneur baru dimana modal usaha dibiayai oleh BPR.

SUSUNAN PENGURUS



KOMISARIS UTAMA :

Yangpi Laidi

Lahir di Pontianak pada 18 Maret 1983. Merupakan Komisaris Utama sekaligus Pemegang saham Pengendali PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna. Lulus Sertifikasi Komisaris BPR (certif) pada tahun 2019. Selain menjadi komisaris utama di PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna beliau juga mengelola bisnis pakaian dengan pengalaman lebih dari sepuluh Tahun.



KOMISARIS :

Eddy Susanto

Lahir di Singkawang pada tanggal 11 Juli 1983. Merupakan Komisaris sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna melalui peristiwa Akuisisi pada tahun 2019. Lulus Sertifikasi Komisaris BPR (certif) pada tahun 2019. Beliau manapaki karir sebagai pengusaha dalam bidang garment dan UMKM lebih dari sepuluh tahun dan mulai menjabat sebagai Komisaris PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna pada tahun 2021.



DIREKTUR UTAMA :

Dwi Agus Bidarto

Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 9 Juli 1964. Menempuh studi ekonomi manajemen di UBL Bandar Lampung (1986-1993), lulus Sertifikasi Direksi BPR (certif) pada tahun 2016. Meniti karir di beberapa BPR swasta dengan jabatan awal sebagai Marketing sampai dengan Kepala Penyelesaian Kredit Bermasalah. Bergabung dengan PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna sejak tahun 2015 dan diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2017.



DIREKTUR OPERASIONAL YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN :

Sajarah

Lahir di Serang pada tanggal 19 September 1995. Menempuh studi Akuntansi di Universitas Bina Bangsa tahun (2016-2020), lulus Sertifikasi Direksi BPR (certif) pada tahun 2021. Bergabung di PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna sejak tahun 2016 sampai sekarang. Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan, menapaki karir mulai dari Staff Administrasi sampai Akunting.

UMUM

I. Pendahuluan

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan kepada Nasabah dengan kualitas yang terbaik, sehingga PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna dapat tumbuh dan berkembang pada tahun 2024, dengan kinerja keuangan yang cukup baik BPR dapat mencetak laba sebelum pajak sebesar Rp. 220.917 Ribu pada tahun 2024 ditunjang dengan kinerja keuangan utama seperti kredit dan simpanan yang terus mengalami pertumbuhan pada tahun 2024.

Laporan tahunan 2024 dimaksudkan untuk menggambarkan PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna dari sisi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha dengan menampilkan ikhtisar keuangan tahun 2024, program kerja, strategi kebijakan manajemen dan pelaksanaan Tata Kelola.

Untuk mendukung Laporan tahunan ini, PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah menunjuk Akntor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan sebagai auditor eksternal atas laporan keuangan tahun buku 2024.

II. Informasi Umum

A. KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan saham PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham Dalam ribuan (Rp)	%
Eddy Susanto	32.960	3.296.000	40.20
Yangpi Laidi	28.040	2.804.000	34.19
Rico	12.800	1.280.000	15.61
Jimmy	8.200	820.000	10.00
Total	82.000	8.200.000	100.00

B. SUSUNAN PENGURUS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Komisaris Utama	Yangpi Laidi	Yangpi Laidi
Komisaris	Eddy Susanto	Eddy Susanto
Direktur Utama	Dwi Agus Budiarto	Dwi Agus Budiarto
Direktur	Sajarah	Sajarah

C. PERKEMBANGAN USAHA BPR

1. Riwayat Singkat PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna sebelumnya bernama PT. BPR Lumbung Mekar Sentosa didirikan pada tanggal 15 Agustus 1989, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan C2-7489.HT.01.01.TH.89 tanggal 15 Agustus 1989. Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akte perubahan No. 35 tanggal 11 Desember 2015 dihadapan notaris Novianti, SH, MH dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0990795 tahun 2015.

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah memperoleh Izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. Kep-034/KM.13/90 tanggal 18 Januari 1990 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Fortuna.

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna diakuisi oleh Pemegang saham Baru dengan akta akuisisi No. 83 tanggal 17 Juli 2019.

Sesuai dengan Akta No. 22 Tanggal 18 Juli 2024 PT BPR Lumbung Mekar Sentosa berganti nama menjadi PT. BPR Lumbung Mekar Sentosa Bersama dengan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Pada tanggal 5 Januari 2021 menempati Gedung Kantor baru yang beralamat di Komplek PCI Blok. KK1 No. 9 RT. 001 RW. 001 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber Kota Cilegon, Banten.

2. Perkembangan dan Pertumbuhan

Perkembangan dan pertumbuhan kinerja keuangan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, terlihat pada table dibawah ini:

Dalam Rupiah Penuh

ASET	2024	2023	Naik/ Turun	%
Kas dalam Rupiah	44,168,494	21,215,046	22,953,448	108.19%
Penempatan pada Bank Lain	6,645,658,442	7,830,552,022	(1,184,893,580)	-15.13%
Kredit yang Diberikan	11,685,407,743	10,533,722,811	1,151,684,932	10.93%
PPAP Kredit	412,558,769	181,090,482	231,468,287	127.82%
Aset Tetap dan Inventaris	2,069,056,825	2,166,789,957	(97,733,132)	4.51%
Total Aset	20,327,187,631	20,247,223,488	79,964,143	0.39%
Tabungan	838,066,016	960,739,810	(122,673,794)	-13%
Deposito	6,932,067,331	5,038,937,253	1,893,130,078	38%
Simpanan dari Bank lain	5,450,000,000	7,400,000,000	(1,950,000,000)	-26%
Modal inti	6,373,654,691	6,208,002,777	165,651,915	3%
Pendapatan Operasional	3,629,842,821	2,929,608,761	700,234,060	24%
Beban Operasional	3,411,377,176	2,797,210,653	614,166,523	22%
Labarugi Tahun Berjalan sebelum Pajak	220,917,411	139,425,039	81,492,372	58%

3. Rasio Keuangan

RASIO KEUANGAN	2024 %	2023 %
a. KPMM	67.77%	73.61%
b. KAP	13.62%	8.18%
c. PPAP	100.00%	100.00%
d. ROA	1.10%	0.76%
e. BOPO	93.83%	95.48%
f. Cash Ratio	29.02%	38.52%
g. LDR	85.17%	78.91%
h. NPL Gross	27.18%	24.78%
i. NPL Netto	23.65%	23.06%
j. Nett Interest Margin	13.06%	11.74%

Melihat perkembangan kinerja keuangan pada tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan hal sebagai berikut :

- Total asset pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 85.741 ribu atau 0.42 % dibandingkan dengan tahun 2023.
- Penyaluran kredit pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.151.685 ribu atau 10.93 % bila dibandingkan dengan tahun 2023.
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

- Tabungan pada tahun 2024 mengalami penurunan 13 % yaitu sebesar Rp. 122.674,- ribu dari tahun 2023;
 - Deposito pada tahun 2024 mengalami kenaikan 38 % yaitu sebesar Rp. 1.893.130,- ribu dari tahun 2023.
 - Simpanan dari Bank lain pada tahun 2024 mengalami penurunan 26% atau sebesar Rp. 1.950.000,- ribu dari tahun 2023.
- d. Rasio Kecukupan Modal atau KPMM sebesar 67.77 % pada Desember 2024.
- e. Rasio BOPO sebesar 93.83 % di tahun 2024 terjadi peningkatan pada jumlah biaya operasional namun demikian kenaikan pendapatan operasional tidak signifikan.
- f. Rasio LDR mengalami kenaikan dari 78.91 % menjadi 85.17 % pada tahun 2024.
- g. Rasio NPL net pada tahun 2024 pada posisi 23.65 % dimana terdiri dari Kolektabilitas Kurang Lancar Rp. 1.776.100,- ribu, Diragukan Rp. 416.076,- ribu dan Macet Rp. 2.148.590,- ribu. Penyebab utama NPL dikarenakan debitur mengalami penurunan omset usaha yang berakibat pembayaran angsuran menjadi terhambat.
- h. Rasio KAP pada tahun 2024 sebesar 13.62 %.
- i. Rasio NIM (*net interest margin*) pada tahun 2024 sebesar 13.06%.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Langkah-langkah strategi PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna pada tahun 2024 adalah fokus pada target pasar Pegawai Swasta dan UMKM di daerah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten serang dengan memperkuat system dan sarana pelayanan serta pemasaran khususnya.

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna menekankan pada kecepatan dalam layanan dan efisiensi operasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta membangun hubungan jangka Panjang yang saling menguntungkan dengan nasabah, karyawan dan para pemegang saham.

Berikut adalah arah kebijakan PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna dalam mendukung rencana tahun 2024 antara lain :

1. Berupaya mewujudkan visi BPR yaitu menjadi BPR yang sehat, aman dan handal serta menjadi mitra solusi keuangan terpercaya.
2. Fokus pada pelayanan pembiayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), dan Pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM yang siap melayani dan melaksanakan tugas secara professional.
4. Senantiasa Menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada setiap lini organisasi, operasional, dan aktivitas bisnis BPR.

E. LAPORAN MANAJEMEN TENTANG PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BPR Lumbung Mekar Fortuna telah menetapkan kebijakan dalam menerapkan Tata Kelola, yaitu:

1. BPR selalu menerapkan prinsip-prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*;
2. Melengkapi struktur organisasi yang diperlukan dalam tata kelola yang baik, yaitu pengangkatan pejabat eksekutif untuk penerapan fungsi audit internal, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan;
3. Transparansi kondisi keuangan BPR dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen setiap tahun;
4. Dalam proses pengambilan keputusan selalu menghindari kondisi benturan kepentingan antara BPR dengan pihak terafiliasi.

Penerapan Tata kelola yang telah dilakukan BPR Lumbung Mekar Fortuna adalah sebagai berikut:

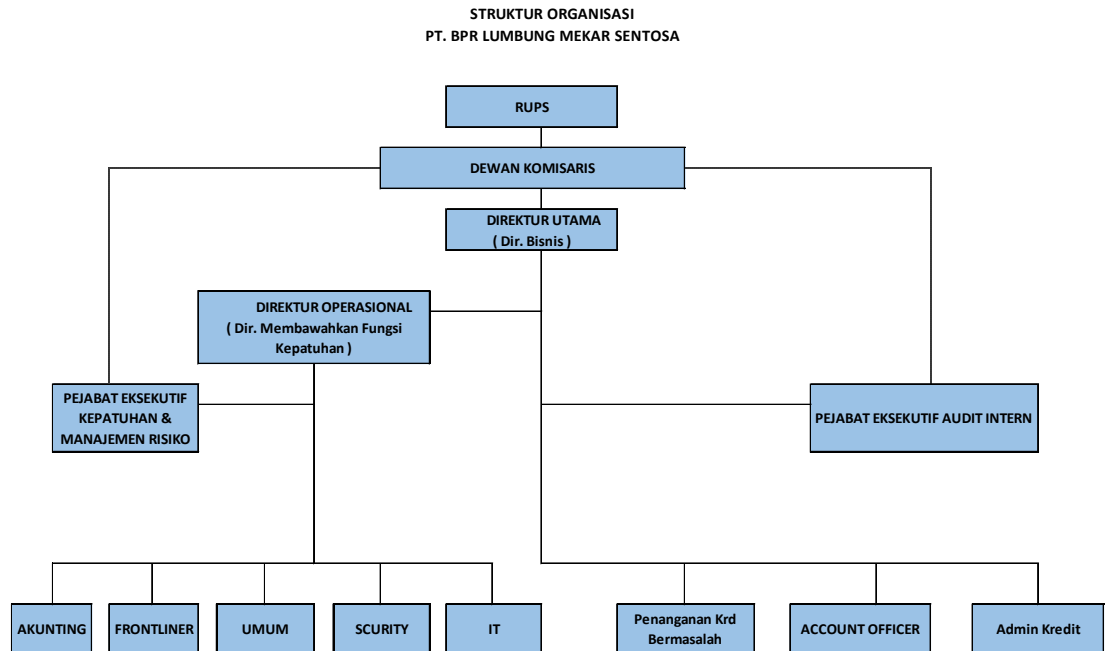
1. Direksi PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan);
2. PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah melakukan pemenuhan terhadap struktur organisasi dalam penerapan tata Kelola;

3. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara baik dan melakukan rapat rutin pada tahun 2024;
4. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit OJK telah dilakukan sepenuhnya oleh Direksi dengan diawasi oleh Dewan Komisaris;
5. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan serta laporan pengaduan nasabah yang telah dilakukan dan tepat waktu.

F. LAPORAN MANAJEMEN

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :



2. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

Maksud dan tujuan PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna adalah berusaha dalam bidang “Bank Perkreditan Rakyat”. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, BPR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan dan Deposito;
- b. Memberikan kredit/ pinjaman;
- c. Memberikan layanan transaksi keuangan melalui kerja sama dengan Bank Umum.

3. Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang diimplementasikan adalah teknologi yang berfokus pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta yang berorientasi pada pelayanan kepada nasabah. Pengembangan di bidang teknologi sistem informasi diarahkan untuk tujuan efisiensi yang mendukung lancarnya kecepatan proses operasional serta untuk menjamin penyajian data yang akurat dan cepat sesuai dengan kebutuhan bank dan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen, selain itu juga dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna telah menggunakan *Core Banking System (CBS) SIGMA*, dimana CBS SIGMA sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan juga telah melakukan penyesuaian terhadap SAK – ETAP. CBS SIGMA terus melakukan pengembangan teknologi informasinya dan pemeliharaan *database*, serta uji coba *Disaster Recovery Center (DRC)*.

4. Perkembangan Pasar dan Target

PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna mengalami perkembangan yang cukup positif jika ditinjau dari perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Kredit yang diberikan pada tahun 2024. Deposito mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 38% atau sebesar Rp. 1.893.130 ribu. Untuk kredit yang diberikan pada Desember 2024 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 1.151.685,- ribu atau 10.93 % jika dibandingkan dengan Desember 2023.

Target pasar PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna berfokus pada pelaku UMKM, Karyawan Swasta dan Pegawai Negeri Sipil dalam penyaluran kredit yang disalurkan untuk usaha dan multiguna.

5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Jumlah kantor PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna sebanyak 1 (satu) kantor pusat yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Pondok Cilegon Indah Blok. KK1 No. 9, Kedaleman, Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

6. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga lain

MITRA	JASA
1) Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan	Audit KAP
2) Kantor Notaris dan PPAT Lia Shinta Dewi, SH,. M.Kn	Notaris
3) Kantor Notaris dan PPAT Rovandi Abdams, SH,.M.Kn	Notaris
4) Kantor Notaris dan PPAT Lina Ria MS, SH., M.Kn	Notaris
5) PT. SIGMA Cipta Caraka	<i>Core Banking System</i>
6) Bank BCA KCP Pluit Kencana	Lalu Lintas Transaksi Keuangan
7) Bank BRI KCP Ahmad Yani	Lalu Lintas Transaksi Keuangan
8) Bank Mandiri KCP Cilegon City Square	Lalu Lintas Transaksi Keuangan
9) Bank BJB KCP Rawamangun	Lalu Lintas Transaksi Keuangan
10) Bank BNI KCP Cilegon City Square	Lalu Lintas Transaksi Keuangan
11) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten	Asuransi
12) PT. Jasa Raharja Insurance	Asuransi

7. Kepemilikan Saham Bank Pada Direksi dan Komisaris

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM
Yangpi Laidi	Komisaris Utama	34.19 %
Eddy Susanto	Komisaris	40.20 %
Dwi Agus Budiarto	Direktur Utama	-
Sajaroh	Direktur	-

8. Keterkaitan antara Pemegang Saham, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	KETERKAITAN DENGAN		
		DEWAN KOMISARIS	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Eddy Susanto	Pemegang Saham Pengendali, Komisaris	Tidak Terkait	Tidak Terkait	Tidak Terkait
Yangpi Laidi	Pemegang Saham Pengendali	Tidak Terkait	Tidak Terkait	Tidak Terkait
Rico	Pemegang Saham	Tidak Terkait	Tidak Terkait	Tidak Terkait
Jimmy	Pemegang Saham	Tidak Terkait	Tidak Terkait	Tidak Terkait
Dwi Agus Budiarto	Direktur Utama	Tidak Terkait	Tidak Terkait	Tidak Terkait
Sajarah	Direktur	Tidak Terkait	Tidak Terkait	Tidak Terkait

9. Sumber Daya Manusia (SDM)

Total karyawan PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna pada akhir tahun 2024 berjumlah 15 orang, dengan beragam jenjang Pendidikan sebagai berikut :

PENDIDIKAN	JUMLAH KARYAWAN
S2	-
S1	5
D3	3
D1	1
SLTA	6
Total	15

10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

- Komposisi dalam pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau setiap satu tahun sekali.
- Anggota Direksi diberikan fasilitas kendaraan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

G. PENUTUP

Kinerja perseroan tahun 2024 terhadap rencana kerja cukup optimal di tengah ketatnya persaingan antar Lembaga jasa keuangan khususnya *fintech*, namun kami tetap optimis dalam menyongsong tahun 2025 dengan melakukan upaya perbaikan-perbaikan serta pembenahan disemua lini dan bagian.

Penyajian Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2024 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan, laporan ini merupakan gambaran dan prospek sekaligus gambaran dari usaha dan seluruh manajemen PT. BPR Lumbung Mekar Fortuna dalam mengelola bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terlampir.

III. LAPORAN KEUANGAN

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNG MEKAR FORTUNA NERACA

31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2024	2023
Kas	2.b, 4	44,168,494	21,215,046
Pendapatan bunga yang akan diterima	2.c, 5	269,368,725	223,142,759
Penempatan pada bank lain	2.d, 6	6,645,658,442	7,830,552,022
		6,645,658,442	7,830,552,022
Kredit yang diberikan	2.e, 7	11,320,876,097	10,171,512,815
Penyisihan penilaian kualitas aset	2.f, 7	(412,558,769)	(181,090,482)
		10,908,317,328	9,990,422,333
Agunan yang diambil alih	2.g, 8	385,955,817	-
Aset tetap	2.g, 9	2,694,761,050	2,660,698,650
Akumulasi penyusutan	2.g, 9	(625,704,225)	(493,908,693)
		2,069,056,825	2,166,789,957
Aset lain-lain	2.j, 10	4,662,000	15,101,371
JUMLAH ASET		20,327,187,631	20,247,223,488
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	2.k, 11	26,700,687	25,449,597
Utang pajak	2.m, 12.a	29,305,285	-
Simpanan	2.n, 13	7,770,133,347	5,999,677,063
Simpanan dari bank lain	2.o, 14	5,448,882,500	7,384,681,354
Pinjaman diterima	2.p, 15	498,687,616	498,718,286
Kewajiban lain-lain	16	52,323,795	60,981,892
Kewajiban imbalan kerja	2.v, 17	31,826,979	-
JUMLAH KEWAJIBAN		13,857,860,209	13,969,508,192
EKUITAS			
Modal saham	18	8,200,000,000	8,200,000,000
Cadangan umum		1,500,000	1,500,000
Akumulasi rugi		(1,732,172,578)	(1,923,784,704)
JUMLAH EKUITAS		6,469,327,422	6,277,715,296
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20,327,187,631	20,247,223,488

PT. BPR LUMBUNG MEKAR FORTUNA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
TAGIHAN KOMITMEN		
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik		
b. Tagihan Komitmen lainnya		
KEWAJIBAN KOMITMEN		
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	24,582,100	113,582,100
b. Penerusan kredit		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
TAGIHAN KONTINJENSI		
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	1,234,950,938	684,558,353
b. Aset produktif yang dihapus buku	275,758,762	263,407,336
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
KEWAJIBAN KONTINJENSI		
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	30,564,441	33,064,441

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNG MEKAR FORTUNA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan bunga	2.q, 19	3,333,315,737	2,685,297,865
Provisi dan komisi	2.r, 19	65,606,260	59,939,720
Jumlah Pendapatan Bunga		3,398,921,997	2,745,237,585
Beban Bunga	2.q, 20	(990,421,436)	(873,821,315)
Pendapatan Bunga Bersih		2,408,500,561	1,871,416,270
Pendapatan Operasional Lainnya			
Pendapatan operasional lainnya	21	230,920,824	184,371,176
Jumlah Pendapatan Operasional		2,639,421,385	2,055,787,446
Beban Operasional			
Beban penyisihan penilaian kualitas aset	22	(303,129,435)	(118,512,772)
Beban pemasaran	23	(19,519,913)	(24,897,100)
Beban administrasi dan umum	24	(2,029,044,263)	(1,741,506,829)
Beban operasional lainnya	25	(69,262,129)	(38,472,637)
Jumlah Beban Operasional		(2,420,955,740)	(1,923,389,338)
Laba Operasional		218,465,645	132,398,108
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan non operasional	2.s, 26	16,376,574	19,778,131
Beban non operasional		(13,924,808)	(12,751,200)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		2,451,766	7,026,931
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		220,917,411	139,425,039
Beban Pajak Penghasilan	2.m, 12.b	(29,305,285)	-
Laba Bersih		191,612,126	139,425,039

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNG MEKAR FORTUNA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Laba Bersih	191,612,126	139,425,039
Penyesuaian Arus Kas dari Aktivitas Operasi:		
Penyisihan penilaian kualitas aset	231,468,287	95,790,874
Penyusutan aset tetap	131,795,532	140,186,060
Koreksi saldo laba	-	(12,053,709)
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Aktivitas Operasi:		
Pendapatan bunga yang akan diterima	(46,225,966)	8,362,097
Penempatan pada bank lain	1,184,893,580	(2,587,753,190)
Agunan yang diambil alih	(385,955,817)	-
Kredit yang diberikan	(1,149,363,282)	(2,478,912,101)
Aset lain-lain	10,439,371	(4,662,000)
Kewajiban Segera	1,251,090	6,892,395
Utang Pajak	29,305,285	-
Kewajiban Imbalan Kerja	31,826,979	(12,197,385)
Kewajiban Lain-lain	(8,658,097)	17,566,091
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	222,389,088	(4,687,355,829)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Aset tetap	(34,062,400)	(14,599,000)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(34,062,400)	(14,599,000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Simpanan	1,770,456,284	(1,102,894,749)
Simpanan dari Bank Lain	(1,935,798,854)	3,592,181,360
Pinjaman Diterima	(30,670)	(3,745,082)
Modal Disetor	-	1,800,000,000
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(165,373,240)	4,285,541,529
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	22,953,448	(416,413,300)
SALDO KAS AWAL TAHUN	21,215,046	437,628,346
SALDO KAS AKHIR TAHUN	44,168,494	21,215,046
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN		
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	44,168,494	21,215,046
Giro pada bank lain	3,815,747,498	5,101,353,159
Tabungan	129,910,944	29,198,863
Deposito	2,700,000,000	2,700,000,000
Jumlah	6,689,826,936	7,851,767,068

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNG MEKAR FORTUNA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Disetor	Cadangan Umum	Akumulasi Rugi	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022	6,400,000,000	1,500,000	(2,051,156,034)	4,350,343,966
Modal disetor	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000
Laba tahun berjalan	-	-	139,425,039	139,425,039
Koreksi laba/(rugi) tahun lal	-	-	(12,053,709)	(12,053,709)
Saldo 31 Desember 2023	8,200,000,000	1,500,000	(1,923,784,704)	6,277,715,296
Koreksi laba/(rugi) tahun lalu		-		-
Laba tahun berjalan	-	-	191,612,126	191,612,126
Saldo 31 Desember 2024	8,200,000,000	1,500,000	(1,732,172,578)	6,469,327,422

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNG MEKAR FORTUNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa (:Bank") dahulu bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Gotong Royong Sentosa, didirikan berdasarkan akta notaris No.118 Tahun 1989 Notaris H.Z. Simon SH., tanggal 27 Maret 1989 di Jakarta.

Selanjutnya PT BPR Gotong Royong Sentosa diubah nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa. Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-7489.HT.01.01.TH'89 tanggal 15 Agustus 1989.

Akta ini mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah perubahan nama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbung Mekar Fortuna terdapat pada akta nomor 22 tanggal 18 Juli 2024 oleh Notaris Novianti, S.H. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043890.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 19 Juli 2024. Perubahan nama ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-180/KO.112/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

b. Tempat Kedudukan

Bank berlokasi di Komplek PCI Blok KK1 No. 9, Kedaleman, Cibeber, Cilegon, Provinsi Banten.

c. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan usaha Bank

1. Maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai PT BPR Lumbung Mekar Fortuna per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk 2 (dua) orang Direksi dan 2 (dua) orang Komisaris (tidak diaudit).

e. Perijinan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank telah memiliki izin-izin sebagai berikut :

Nomor In : 9120004440945 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 4 April

Nomor Pr : 01.495.202.2-417.000

Surat Ijin : Kep-034/KM.13/90 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia

f. Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 13 Juli 2023 oleh Notaris Novianti, SH., MM., oleh Notaris Novianty SH., MM., susunan pengurus PT BPR Lumbung Mekar Sentosa, per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yangpi Laidi
Komisaris : Eddy Susanto

Direksi

Direktur Utama : Dwi Agus Budiarto SE., CRBD
Direktur : Sajaroh

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Kebijakan akuntansi PT BPR Lumbung Mekar Fortuna yang diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pedoman Akuntansi BPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan masing-masing akun

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Kas dan SetaraKas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dan fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima dinyatakan sebesar bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

d. Penempatan pada Bank Lain

Giro dan Tabungan

Dana pada bank lain yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan bertujuan untuk menunjang aktivitas operasional.

Deposito Berjangka

Penanaman dana bank pada bank lain, dalam bentuk deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

e. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan disajikan sebesar pokok kredit/baki debit. Provisi dan biaya transaksi ditanggung oleh nasabah yang bersangkutan.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai penghasilan bunga yang ditangguhkan.

Kredit diklasifikasikan sebagai *non-performing* pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok kredit atau bunga kredit tersebut mulai kurang lancar. Penghasilan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai *non-performing* tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai penghasilan pada saat diterima.

Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan kredit diakui sebagai porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Agunan digunakan untuk memitigasi risiko kredit dan kebijakan mitigasi menentukan jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank. Umumnya jenis agunan yang diterima Bank untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah deposito berjangka, tanah dan bangunan, dan kendaraan bermotor.

Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (*secondary source of credit repayment*) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kredit dihapuskan jika tidak ada peluang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank.

Kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur adalah sebagai berikut:

- Kriteria yang memiliki kualitas macet;
- Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset sebesar 100% dari pokok kredit;
- Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*);
- Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
- Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan

f. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Aset produktif terdiri dari penempatan pada bank lain selain giro, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

Bank membentuk penyisihan penilaian kualitas aset berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing aset produktif sesuai dengan POJK No. 1 tahun 2024.

Penempatan Pada Bank Lain

Bagian penempatan pada bank lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA umum dan khusus.

Presentase penyisihan penilaian ditetapkan sebesar:

PPKA Umum

Lancar : 0,50%

PPKA Khusus

Kurang Lancar : 10,00%

Macet : 100,00%

Kredit Yang Diberikan

PPKA umum dan PPKA khusus untuk kredit yang diberikan dengan penjelasan sebagai berikut:

PPKA Umum

Lancar : 0,50%

PPKA Khusus

Dalam Perhatian Khusus: 3,00%

Kuang Lancar : 10,00%

Diragukan : 50,00%

Macet : 100,00%

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (lanjutan)

Persentase tersebut dikalikan dengan baki debit setelah dikurangi nilai agunan:

- 100% dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan, dan logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai;
- 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% dari nilai agunan berupa resi gedung yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat
- 50% dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi
- 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perekonomian
- 30% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

g. Agunan yang Diambil Alih

Agunan (jaminan) yang diambil alih merupakan agunan kredit yang diberikan yang telah diambil alih oleh Bank dan telah diikat secara notariil.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebagai aset sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan kredit setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika dijual. Apabila terdapat penurunan nilai permanen dari agunan kredit yang diambil alih, maka nilai agunan kredit

Dalam hal taksiran nilai agunan lebih rendah dari nilai kredit, maka selisih lebih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan.

Apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambil-alihan agunan tersebut dibebankan ke

Laba atau rugi akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Kewajiban Segera

Kewajiban yang telah jatuh tempo dan/atau segera dapat ditagih dan harus segera dibayar. Transaksi kewajiban segera diakui pada saat:

1. Kewajiban telah jatuh tempo; atau
2. Kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat

l. Utang Bunga

Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh

m. Perpajakan

Perseroan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perseroan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perseroan tidak mengakui pajak tangguhan.

n. Simpanan dari Nasabah

Simpanan adalah dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Tabungan

- Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung.
- Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
- Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

Deposito Berjangka

- Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal atau sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet
- Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
- Kewajiban bunga bank deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

o. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

Tabungan

- Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain.
- Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
- Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

Deposito Berjangka

- Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal atau sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet
- Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
- Kewajiban bunga bank deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain dan/atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (*accrual basis*).

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Seluruh penerimaan kas atas kredit yang diklasifikasikan sebagai *non-performing*, diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas di atas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pengakuan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai dilaporkan sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima

Beban diakui pada saat terjadinya.

r. Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan diakui sebagai pendapatan (beban) provisi dan komisi secara proporsional atau ditangguhkan, serta diamortisasi selama jangka waktu kreditnya.

Pendapatan dan beban provisi atau komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengkreditan dan jangka waktu tertentu ataupun tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada

s. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

t. Komitmen dan Kontijensi

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontijensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat diinformasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan.

Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perseroan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);
Pihak tersebut adalah entitas dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang
- vi. Pihak tersebut adalah program imbalan pascakerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perseroan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungannya.

Perseroan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara

v. Program Imbalan Kerja

Perseroan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perseroan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Undang - Undang Cipta Kerja) (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU Ketenagakerjaan) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mana yang lebih

Perseroan mampu untuk menggunakan metode projected unit credit untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Sehingga Perseroan dalam menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pascakerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui dalam laporan laba rugi. Perseroan tidak menyetel aset program imbalan pasti.

w. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal neraca (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi instrumen keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan SAK-ETAP dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Bank adalah mata uang dan lingkungan ekonomi primer dimana Bank beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Bank, mata uang fungsional Bank adalah Rupiah.

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)

Bank melakukan penelaahan atas kredit pada setiap tanggal pelaporan untuk melakukan penilaian atas penyisihan penilaian kualitas aset (PPKA) yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk melakukan estimasi atas jumlah dan waktu arus kas dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah PPKA. Nilai tercatat dari kredit bank setelah dikurangi PPKA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 10.908.317.328 dan Rp 9.990.422.333 .

Liabilitas imbalan pasca kerja

Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan pasca kerja bank yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp31.826.979 dan nihil. Imbalan kerja di BJB-Banten, dibuat untuk masing-masing karyawan.

Penyusutan aset tetap

Nilai perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 4 sampai 8 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset. Nilai tercatat bersih atas aset tetap Bank pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.069.056.825 dan Rp 2.166.789.957.

Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku.

4. KAS

Akun ini merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo kas per 31 Desember 2024 diasuransikan di **Asuransi JASA RAHARJA PUTERA**.

	2024	2023
Kas	44,168,494	21,215,046
Jumlah kas	44,168,494	21,215,046

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Akun ini merupakan saldo pendapatan bunga yang akan diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
PYAD Bunga Kredit	262,446,594	223,142,759
PYAD Bunga Deposito ABA	6,922,131	-
Jumlah pendapatan bunga yang akan diterima	269,368,725	223,142,759

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN
a. Berdasarkan Jenis dan Pihak :

	2024	2023
Giro		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1,317,095,555	1,144,465,026
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1,021,137,341	1,430,667,284
PT Bank Central Asia, Tbk	654,706,811	1,245,314,159
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk	519,995,285	1,229,910,549
PT Bank Negara Indonesia Tbk	251,536,603	-
PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk	51,275,903	50,996,141
Jumlah Giro	3,815,747,498	5,101,353,159
Tabungan		
PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	100,000,000	-
PT. BPR Indra Candra	25,989,336	24,600,853
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk	3,921,608	4,598,010
Jumlah Tabungan	129,910,944	29,198,863
Deposito		
PT BPR Fianka Rezalina Fatma	700,000,000	700,000,000
PT BPR Indra Candra	500,000,000	500,000,000
PT BPR Vinski Mukti Artha	500,000,000	500,000,000
PT BPR Asri Cikupa	500,000,000	500,000,000
PT BPR Laksana Binacilegon	500,000,000	500,000,000
Jumlah Deposito	2,700,000,000	2,700,000,000
	6,645,658,442	7,830,552,022
Penyisihan Kerugian	-	-
Jumlah Penempatan pada Bank Lain (Bersih)	6,645,658,442	7,830,552,022

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)
b. Berdasarkan Kolektibilitas :

Penempatan pada Bank lain digolongkan semuanya lancar

7. KREDIT YANG DIBERIKAN
a. Berdasarkan Jenis Kredit

	2024	2023
Konsumtif	5,435,975,341	4,097,033,495
Modal Kerja	5,865,432,402	5,967,705,055
Rekening Koran	384,000,000	445,000,000
Kredit Emas	-	23,984,261
	11,685,407,743	10,533,722,811
Provisi dan administrasi	(68,734,241)	(68,140,501)
Pendapatan bunga restrukturisasi	(295,797,405)	(294,069,495)
	11,320,876,097	10,171,512,815
Penyisihan penilaian kualitas aset	(412,558,769)	(181,090,482)
Jumlah - bersih	10,908,317,328	9,990,422,333

b. Berdasarkan Kolektibilitas

	2024	2023
Lancar	6,732,911,001	6,788,459,013
Dalam Perhatian Khusus	1,776,100,216	1,135,259,922
Kurang Lancar	416,076,741	844,762,144
Diragukan	611,729,760	900,487,498
Macet	2,148,590,025	864,754,234
	11,685,407,743	10,533,722,811
Provisi dan administrasi	(68,734,241)	(68,140,501)
Pendapatan bunga restrukturisasi	(295,797,405)	(294,069,495)
	11,320,876,097	10,171,512,815
Penyisihan penilaian kualitas aset	(412,558,769)	(181,090,482)
Jumlah - bersih	10,908,317,328	9,990,422,333

c. Berdasarkan Pihak Keterkaitan

	2024	2023
Pihak terkait	208,049,132	509,844,838
Pihak tidak terkait	11,477,358,611	10,023,877,973
	11,685,407,743	10,533,722,811
Provisi dan administrasi	(68,734,241)	(68,140,501)
Pendapatan bunga restrukturisasi	(295,797,405)	(294,069,495)
	11,320,876,097	10,171,512,815
Penyisihan penilaian kualitas aset	(412,558,769)	(181,090,482)
Jumlah - Bersih	10,908,317,328	9,990,422,333

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)
d. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

	2024	2023
Saldo awal	(181,090,482)	(85,299,608)
Pembentukan PPKA tahun berjalan	(303,129,435)	(329,256,172)
Hapus buku PPKA tahun berjalan	71,661,148	233,465,298
Saldo Akhir	(412,558,769)	(181,090,482)

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Akun ini merupakan saldo agunan yang diambil alih pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp385.955.817 dan nihil.

9. ASET TETAP

Akun ini merupakan nilai buku bersih aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan mutasi

	2024				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi	Saldo Akhir
Harga Peroleha					
Tanah dan bangunan	2,211,638,900	13,000,000	-	-	2,224,638,900
Kendaraan	173,243,000	-	-	-	173,243,000
Perlengkapan	275,816,750	21,062,400	-	-	296,879,150
	<u>2,660,698,650</u>	<u>34,062,400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,694,761,050</u>
Akumulasi Penyusutan					
Tanah dan bangunan	223,503,567	71,088,768	-	-	294,592,335
Kendaraan	84,816,858	21,655,368	-	-	106,472,226
Perlengkapan	185,588,268	39,051,396	-	-	224,639,664
	<u>493,908,693</u>	<u>131,795,532</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>625,704,225</u>
Nilai Buku	<u>2,166,789,957</u>				<u>2,069,056,825</u>
	2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi	Saldo Akhir
Harga Peroleha					
Peralatan dan perlengkapan	2,211,638,900	-	-	-	2,211,638,900
Kendaraan	173,243,000	-	-	-	173,243,000
Perlengkapan	261,217,750	14,599,000	-	-	275,816,750
	<u>2,646,099,650</u>	<u>14,599,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,660,698,650</u>
Akumulasi Penyusutan					
Peralatan dan perlengkapan	155,900,031	67,603,536	-	-	223,503,567
Kendaraan	63,161,490	21,655,368	-	-	84,816,858
Perlengkapan	134,661,112	50,927,156	-	-	185,588,268
	<u>353,722,633</u>	<u>140,186,060</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>493,908,693</u>
Nilai Buku	<u>2,292,377,017</u>				<u>2,166,789,957</u>

10. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Biaya dibayar dimuka sewa cbs Sigma	4,662,000	9,324,000
Pajak dibayar dimuka (PPH 25)	-	5,777,371
Jumlah aset lain-lain	4,662,000	15,101,371

11. KEWAJIBAN SEGERA

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	8,304,474	10,297,981
Pajak penghasilan pasal 21	794,536	545,071
Pajak penghasilan pasal 23	200,000	439,998
Premi BPJS ketenagakerjaan	8,095,120	11,557,117
Premi BPJS kesehatan	5,697,845	-
Titipan nasabah premi asuransi	3,608,712	2,609,430
Jumlah Kewajiban Segera	26,700,687	25,449,597

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2024	2023
Pajak penghasilan pasal 29	29,305,285	-
Jumlah Utang Pajak	29,305,285	-

b. Perhitungan Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal tahun buku 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Laba (rugi) sebelum pajak	220,917,411	139,425,039
Koreksi fiskal :		
Pembentukan imbalan kerja	31,826,979	-
Beban pajak penghasilan	5,644,039	-
Sumbangan	7,940,400	-
Konsumsi Rapat	2,686,000	-
Seragam karyawan	12,313,000	-
Biaya perayaan dan hiburan	1,044,600	-
Beban non operasional lainnya	809,808	-
Laba rugi setelah koreksi fiskal	283,182,237	139,425,039
Akumulasi kerugian fiskal tahun lalu :		
Tahun 2018	(59,823,000)	(59,823,000)
Tahun 2019	(445,347,926)	(455,347,926)
Tahun 2020	(27,522,000)	(27,522,000)
Tahun 2021	(256,560,629)	(256,560,629)
Tahun 2022	643,057,964	643,057,964
Tahun 2023	139,425,039	-
Total akumulasi kerugian fiskal tahun lalu	(16,770,552)	(156,195,591)
Akumulasi laba (rugi) fiskal tahun berjalan	266,411,685	(16,770,552)
Beban pajak penghasilan (lebih) kurang bayar	29,305,285	-

13. SIMPANAN

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Tabungan	838,066,016	960,739,810
Deposito berjangka	6,932,067,331	5,038,937,253
Jumlah Simpanan	7,770,133,347	5,999,677,063

a. Tabungan
Tabungan

	2024	2023
Tabungan Mekar	740,850,252	799,022,111
Tabungan Berjangka Silver	61,010,653	59,565,964
Tabungan Berjangka Gold	432	432
Tabungan Berjangka Platinum	1,363,745	80,407,797
Tabungan Berjangka Mekar Prestasi	34,840,934	21,743,506

Jumlah Tabungan

838,066,016	960,739,810
--------------------	--------------------

Pihak terkait

80,163,870	226,661,962
------------	-------------

Pihak tidak terkait

757,902,146	734,077,848
-------------	-------------

Jumlah Tabungan

838,066,016	960,739,810
--------------------	--------------------

Tingkat bunga rata-rata tabungan per tahun adalah sebesar 3,75% - 6% untuk tahun 2024.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga.

b. Deposito Berjangka

	2024	2023
Pihak terkait	189,848,504	137,757,855
Pihak tidak terkait	6,742,218,827	4,901,179,398
Jumlah Deposito	6,932,067,331	5,038,937,253

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu :

	2024	2023
1 Bulan	1,252,067,331	872,937,253
3 Bulan	830,000,000	805,000,000
6 Bulan	2,850,000,000	1,361,000,000
12 Bulan	2,000,000,000	2,000,000,000
Jumlah Deposito	6,932,067,331	5,038,937,253

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka per tahun adalah sebesar 6,25 %- 6.75% untuk tahun 2024.

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka yang diberikan kepada pihak hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberikan kepada pihak ketiga.

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Akun ini merupakan saldo simpanan dari bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Deposito		
PT BPR Laksana Binacilegon	1,400,000,000	1,400,000,000
PT BPR Karya Artha Sejahtera	1,000,000,000	2,000,000,000
PT BPR Indra Candra	1,000,000,000	1,000,000,000
PT BPR Serang Perseroda	300,000,000	550,000,000
PT BPR Amal Bhakti Sejahtera	250,000,000	750,000,000
PT BPR Berkah Perseroda	500,000,000	700,000,000
PT BPR Vinski Multi Arta	500,000,000	-
PT BPR Luna Sinar Indonesia	500,000,000	-
PT BPR Permata Dharmawira	-	1,000,000,000
	5,450,000,000	7,400,000,000
Biaya transaksi belum diotorisasi	(1,117,500)	(15,318,646)
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	5,448,882,500	7,384,681,354

15. PINJAMAN DITERIMA

Akun ini merupakan saldo pinjaman diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
PT BPR Indra Candra	499,937,616	499,968,286
	499,937,616	499,968,286
Biaya Transaksi	(1,250,000)	(1,250,000)
Jumlah Pinjaman Diterima	498,687,616	498,718,286

PT BPR INDRA CANDRA

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Linkage No. 075/KRE/SGR/BIC/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, maka PT BPR Lumbung Mekar Fortuna mendapat fasilitas linkage dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kredit	: Kredit Linkage
Jenis Penggunaan	: Modal Kerja
Limit Kredit	: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Jangka Waktu	: 12 bulan
Suku Bunga	: 9.5% p.a efektif
Agunan	: Bilyet Deposito No. 006823

16. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo kewajiban lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Bunga yang masih harus dibayar	23,773,317	26,416,731
Cadangan pendidikan	10,550,478	17,233,653
Utang bunga deposito jatuh tempo	-	1,331,508
Lainnya	18,000,000	16,000,000
Jumlah Kewajiban Lain-lain	52,323,795	60,981,892

17 KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Berikut ini mutasi kewajiban imbalan kerja :

	2024	2023
Saldo awal	-	-
Pembentukan imbalan kerja	86,792,757	-
Pembayaran iuran DPLK	(54,965,778)	-
Saldo Akhir	31,826,979	-

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Disetor
Eddy Susanto	32,960	40%	3,296,000,000
Yangpi Laidi	28,040	34%	2,804,000,000
Rico	12,800	16%	1,280,000,000
Jimmy	8,200	10%	820,000,000
Jumlah Modal Disetor	82,000	100%	8,200,000,000

19. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Bunga Antar Bank:		
Giro	50,456,703	54,574,756
Tabungan	508,483	507,624
Deposito Berjangka	178,205,682	112,360,819
Jumlah Bunga Antar Bank	229,170,868	167,443,199
Pendapatan Bunga Kontraktual		
Kredit Modal Kerja	1,450,981,691	1,268,249,690
Kredit Konsumtif	1,558,505,955	1,099,173,681
Kredit Rekening Koran	12,810,000	81,183,588
Kredit Emas	3,304,974	10,506,856
Pendapatan bunga yang ditangguhkan restruktur	78,542,249	58,740,851
	3,104,144,869	2,517,854,666
	3,333,315,737	2,685,297,865
Provisi dan Administrasi Kredit		
Provisi dan administrasi kredit	65,606,260	59,939,720
	65,606,260	59,939,720
Jumlah Pendapatan	3,398,921,997	2,745,237,585

20. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Beban Bunga Kepada Nasabah Tabungan		
Tabungan Mekar	19,618,312	25,597,788
Tabungan Berjangka Silver	2,055,048	2,456,398
Tabungan Berjangka Platinum	11,423,616	7,215,020
Tabungan Berjangka Mekar Prestasi	1,141,490	769,061
	34,238,466	36,038,267
Deposito Berjangka		
Deposito 1 Bulan	65,979,720	169,331,301
Deposito 3 Bulan	54,889,239	56,666,047
Deposito 6 Bulan	184,115,094	85,215,903
Deposito 12 Bulan	135,021,210	149,953,738
	440,005,263	461,166,989
Beban Bunga Deposito dari Bank Lain	415,788,270	279,212,632
Beban Bunga Pinjaman dari PT BPR Indra Candra	48,256,453	48,115,907
Beban Provisi	3,000,000	-
Beban Penjaminan LPS	29,281,838	24,937,206
	496,326,561	352,265,745
Provisi Pinjaman	-	2,666,664
Transaksi Simpanan pihak	16,751,146	15,431,360
Transaksi simpanan dari bank	3,100,000	6,252,290
	19,851,146	24,350,314
Jumlah Beban Bunga	990,421,436	873,821,315

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Pendapatan administrasi dan pinalti kredit	100,725,000	126,360,000
Penerimaan kredit yang dihapus buku	69,273,000	-
Pendapatan denda kredit	58,691,730	53,291,735
Pendapatan transaksi laku pandai	897,602	2,027,936
Pendapatan penutupan tabungan	50,302	700,000
Pendapatan pinalti simpanan	29,590	191,505
Pendapatan administrasi tabungan	-	-
Pendapatan sita agunan	-	1,000,000
Jasa transaksi lainnya	1,253,600	800,000
	230,920,824	184,371,176
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	230,920,824	184,371,176

22. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PPKA Kredit yang diberikan	303,129,435	118,512,772
Jumlah Pembentukan Penyisihan Penilaian Kualiti	<u>303,129,435</u>	<u>118,512,772</u>

23. BEBAN PEMASARAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban pemasaran	19,519,913	24,897,100
Jumlah Beban Pemasaran	<u>19,519,913</u>	<u>24,897,100</u>

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban tenaga kerja	1,592,171,714	1,336,094,190
Beban barang dan jasa	173,461,708	143,261,629
Beban penyusutan aset tetap	131,795,532	140,186,060
Beban sewa	60,606,000	51,892,500
Beban pendidikan dan pelatihan	40,082,825	47,515,586
Beban pemeliharaan dan perbaikan	12,920,265	11,190,954
Beban pajak-pajak	9,393,309	2,753,000
Beban asuransi	8,612,910	8,612,910
Beban Administrasi dan Umum	<u>2,029,044,263</u>	<u>1,741,506,829</u>

25. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pengacara dan penyelesaian	23,600,000	298,000
luran perbarindo	18,000,000	7,000,000
Administrasi bank	13,037,255	13,336,357
Pungutan otoritas jasa	10,000,000	10,000,000
Admin laku pandai	1,037,882	2,537,680
Pemeliharaan sipro	110,000	-
Ganti nama	150,000	-
Sumbangan	-	2,459,100
luran perbarindo jaringan	-	1,552,500
Lainnya	3,326,992	1,289,000
Jumlah Beban Operasional Lainnya	<u>69,262,129</u>	<u>38,472,637</u>

26. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
Pendapatan Non Operasional		
Pendapatan komisi asuransi	14,581,585	16,004,858
Pendapatan komisi notaris	1,750,000	3,700,000
Selisih kas lebih	4,989	73,273
Pendapatan lainnya	40,000	-
	16,376,574	19,778,131
Beban Non Operasional		
Sumbangan	7,940,400	9,300,000
Denda otoritas jasa keuangan	4,130,000	2,030,000
Biaya perayaan dan hiburan	1,044,600	1,421,200
Lainnya	809,808	-
	13,924,808	12,751,200
Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional	2,451,766	7,026,931

27. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA

Berikut ini transaksi pihak-pihak terkait :

2024				
Nama	Sifat Hubungan	Plafond	Baki Debet	Presentase terhadap modal Inti
Jimmy	Pemegang saham	65,004,829	52,012,285	0.81%
PT Topan Badai Sakti	Pemegang saham yang sama	195,014,465	156,036,847	2.44%
Jumlah		260,019,294	208,049,132	3.26%
2023				
Nama	Sifat Hubungan	Plafond	Baki Debet	Presentase terhadap modal Inti
Eddy Susanto	Pemegang saham	44,800,000	23,984,261	0.39%
Jimmy	Pemegang saham	75,000,000	65,965,149	1.06%
PT Topan Badai Sakti	Pemegang saham yang sama	225,000,000	197,895,428	3.19%
Evi Sukmariya	Personil/manajemen kunci	240,000,000	222,000,000	3.58%
Jumlah		584,800,000	509,844,838	8.21%

28. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perusahaan memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi dengan rincian sebagai berikut :

	2024	2023
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum ditarik	24,582,100	113,582,100
Tagihan Kontijensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1. Bunga Kredit Yang Diberikan	1,234,950,938	684,558,353
2. Bunga Penempatan Pada Bank Lain	-	-
b. Aset Produktif Yang Dihapusbuku		
1. Kredit Yang Diberikan	275,758,762	263,407,336
Kewajiban Kontijensi	-	-
Rekening Administratif lainnya	30,564,441	33,064,441

29. INFORMASI LAINNYA

Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah dan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2023 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, Bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi nasabah, menerapkan manajemen risiko atas prinsip mengenal nasabah dan melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan selambatnya 3 (tiga) hari setelah diketahui oleh Bank. Bank wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan secara efektif.

Direksi Bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Perusahaan telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal di Sektor Jasa Keuangan, yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi sesuai dengan peraturan tersebut. Pada saat ini, manajemen Bank masih terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pelaksanaan penerapan prinsip mengenal

30. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah peraturan yang mengatur tentang penyisihan nilai aset keuangan yang menurun.

Tahun 2025 diterapkan peraturan dari OJK, bahwa penerapan PPKA dirubah menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perhitungan dan pembentukan CKPN dilakukan dengan menggunakan PSAK 459. CKPN dibentuk ketika nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai lebih kecil dari nilai tercatat awal.

Dasar hukum POJK mengenai CKPN adalah:

- UU No. 7 Tahun 1992
- UU No. 21 Tahun 2011
- UU No. 4 Tahun 2023

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP)

POJK dan SAK adalah peraturan dan standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat. SAK EP berlaku efektif pada 1 Januari 2025. SAK EP merupakan adopsi dari IFRS for SMEs yang disesuaikan

31. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dewan Direksi telah menyelesaikan dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan PT BPR Lumbang Mekar Fortuna untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 pada tanggal 25 April 2025.



Kantor Akuntan Publik

IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN

Registered Public Accountants

Jl. Surilang No. 06 A RT.03/01, Gedong, Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760 || Telp/Fax.: (021) 2298 4018, (021) 800 4845
e-mail : kap.irfanahsdarmawan@gmail.com-irfanahsdarmawan@kapiad.co.id || website: www.kapiad.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00119/2.1181/AU.2/07/1365-2/1/IV/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LUMBUNG MEKAR FORTUNA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbang Mekar Fortuna (“Perusahaan”), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.



Kantor Akuntan Publik

IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN

Registered Public Accountants

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Kantor Akuntan Publik

IRFAN, ABDULRAHMAN HASAN SALIPU & DARMAWAN

Registered Public Accountants

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik

Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan

Toni Darmawan, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1365

Izin Usaha KAP No. 45/KM.1/2018



Jakarta, 25 April 2025

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PT BPR Lumbang Mekar Fortuna**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Agus Budiarto
Alamat Kantor : Komplek PCI Blok. KK1 No. 9 Kelurahan Kedaleman
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Banten
Alamat domisili sesuai KTP : Citra Gading Blok. D3 No. 20 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan
Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Lumbang Mekar Fortuna.
2. Laporan keuangan PT BPR Lumbang Mekar Fortuna telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
3. a. Semua informasi Laporan Keuangan PT BPR Lumbang Mekar Fortuna telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT BPR Lumbang Mekar Fortuna tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT BPR Lumbang Mekar Fortuna.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cilegon, 25 April 2025



Dwi Agus Budiarto
Direktur Utama



LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR LUMBUNG MEKAR FORTUNA
TAHUN 2024

**Komplek PCI Blok. KK1 No. 9 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Kota Cilegon,
Banten**



BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip- prinsip GCG.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*)

Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.



3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*independency*)

Adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*fairness*)

Adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

A. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tata kelola, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekoniman Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;



4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
6. POJK No. 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Tujuan Tata Kelola

PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat, dengan tujuan :

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank;
2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR;
4. Memperbaiki budaya kerja Bank;
5. Menarik minat dan kepercayaan.

C. Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktekan dengan standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.



BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna pada posisi 31 Desember 2024 memiliki Modal Inti sebesar Rp. 6.469.460 ribu atau masih di bawah Rp50 milyar dan dengan total aset sebesar Rp. 20.327.187 ribu atau di atas Rp10 milyar. Sesuai ketentuan, maka BPR dalam penerapan Tata Kelola paling sedikit memuat :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi Kepatuhan;
5. Penerapan fungsi Audit Intern;
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk system pengendalian intern;
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Rencana Bisnis BPR;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Jumlah dan Komposisi Direksi

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna per 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 13 Juli 2023 dihadapan Notaris Novianti, SH, MM adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan surat persetujuan OJK No.SR-4/KR.0113/2021;
- b. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) serta telah memiliki Sertifikasi Direksi;
- c. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan);
- d. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan



derajat kedua dengan sesama anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan;
 - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat;
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



3. Perapan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- b. Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- c. Direksi selalu berupaya menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- d. Direksi menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- e. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan;

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna dan BPR/BPRS lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di PT. BPR LMS		Kepemilikan Saham Di BPR/ BPRS lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwi Agus Budiarto	Direktur Utama		√		√
Sajarah	Direktur Operasional		√		√

5. Indenpendensi Anggota Direksi

Sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS:

- a. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- b. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Dwi Agus Budiarto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sajarah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
	Anggota Direksi lain	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Dwi Agus Budiarto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Sajarah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Jumlah Dan Komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna per 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 Tanggal 13 Juli 2023 dihadapan Notaris Novianti, SH,.MM adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang yaitu Eddy Susanto sebagai Komisaris dan Yangpi Laidi sebagai Komisaris Utama
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) serta telah memiliki Sertifikasi Komisaris;
- c. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;
- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.



2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

3. Perapan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris melakukan rapat Dewan Komisaris Minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka evaluasi pelaksanaan RBB 2023 dan penerapan tata kelola BPR yang baik, ditindaklanjuti dengan rapat dengan Direksi dan Pejabat, terkait dengan evaluasi kinerja dan dalam rangka memberikan arahan;
- b. Dewan Komisaris senantiasa memberikan hasil pengawasan dan arahan baik yang dituangkan dalam risalah rapat maupun dalam bentuk memorandum kepada Direksi untuk hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti;
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain



pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;

- d. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dan hal-hal penting lainnya antara lain penyelesaian kredit Dalam Perhatian Khusus dan NPL.
- e. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan;
- f. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan;
- g. Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh Dewan Komisaris memiliki saham pada PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna dan BPR/BPRS lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di PT. BPR LMF		Kepemilikan Saham Di BPR/ BPRS lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yangpi Laidi	Komisaris Utama	√		√	
Eddy Susanto	Komisaris	√		√	

Nama	Jabatan	Jumlah Saham Di PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna
Yangpi Laidi	Komisaris Utama	34.20%
Eddy Susanto	Komisaris	40.20%



5. Indenpendensi Anggota Direksi

Sebagaimana dimaksud dalam POJK 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR/BPRS. Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Direksi dan anggota Komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama Komisaris	Hubungan Keuangan		
	Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Yangpi Laidi	ada	Tidak ada	ada
Eddy Susanto	ada	Tidak ada	ada

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga		
	Dewan Komisaris lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
Yangpi Laidi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Eddy Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

C. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Jenis Remunerasi dalam Satu Tahun	Direksi		Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	256.380.000	2	39.000.000
2.	Tunjangan	2	21.365.000	2	3.000.000
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	2	5.000.000		-
Total			282.745.000		42.000.000,-
Fasilitas Lain					
1.	Transportasi	1	66.770.774	-	-
2.	Asuransi Kesehatan	2	10.255.200	2	4.622.496



D. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Perbandingan	
	a / b	: 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.69	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28	: 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	8	: 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.96	: 1

E. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam Satu Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi
1.	22 Mei 2024	4	Persetujuan rencana kredit hapus buku
2.	14 Juni 2024	2	Evaluasi Kineja BPR dan Pelaksanaan APU PPT
3.	25 Juli 2024	4	Pembahasan Rencana Konsolidasi BPR
4.	16 Desember 2024	2	Persetujuan Rencana AYDA

F. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0						
Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0



G. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Total	1	-

Terdapat 1 (satu) Gugatan yang didaftarkan oleh PT BPR Lumbang Mekar Fortuna melalui kuasa hukum terhadap Debitur wanprestasi selama tahun 2024.

H. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam Penerapannya, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, pengurus selalu bertindak secara profesional dan obyektif serta dalam memutuskan kredit yang berpotensi terjadi benturan kepentingan keputusan dilakukan melalui keputusan rapat komite kredit.

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna.

I. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2024 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

1. Direktur Operasional telah ditunjuk melalui RUPS sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan telah dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatan dengan keputusan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan berdasarkan surat keputusan OJK No.SR-4/KR.0113/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
2. Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.
3. Direksi dan Audit Internal dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan



Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif pelaksana Fungsi Kepatuhan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-536/ KR.0113/2018 tanggal 19 Juli 2019, sehingga Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Evi Sukmariyati	PE Kepatuhan

J. Penerapan Fungsi Audit Intern dan Ekstern

1. Penerapan Fungsi Audit Internal

- a. Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern. Adapun Pejabat Eksekutif yang di tunjuk adalah :

Nama	Jabatan
Maulana Achmad Fadhil	PE Audit Internal

- b. Pedoman Kerja dan Prosedur Audit intern PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna diterbitkan pada tahun 2021;
- c. Secara struktur Pejabat Eksekutif audit intern belum independen terhadap satuan kerja operasional (satuan terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama;
- d. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan cukup memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindaklanjut hasil audit;
- e. PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern periode tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan.



2. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Untuk periode pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir tahun 2024, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna menunjuk Kantor Akuntan Publik Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan telah terdaftar di OJK dan telah mendapat persetujuan RUPS tanggal 17 Oktober 2024 Penugasan audit kepada KAP tersebut telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik.

K. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko. Adapun Pejabat Eksekutif yang ditunjuk adalah :

Nama	Jabatan
Evi Sukmariyati	PE Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, BPR sudah melakukan upaya rencana tindak penerapan manajemen risiko dan realisasi tindak penerapan Manajemen Risiko yang dalam tahapan pelaksanaannya sesuai dengan klasifikasi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) paling sedikit bisa menerapkan 4 (empat) Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Untuk Pelaporan Profil risiko per posisi tanggal neraca 31 Desember 2024 (Laporan Profil Risiko Semester II Tahun 2024), PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah menggunakan pendekatan 4 (tiga) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional Risiko Kepatuhan dna Risiko Likuiditas.

L. Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait;
2. Bank telah menyampaikan laporan BMPK yang sudah tergabung dalam Laporan Bulanan setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



M. Rencana Bisnis BPR

Adapun Laporan Realisasi Rencana Bisnis PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Rencana Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase
Total Aset	25,597,627,467	20,327,898,997	79.41
Kredit yang diberikan	14,052,604,950	11,685,407,743	83.15
Tabungan	1,150,509,365	838,066,016	72.84
Deposito	10,241,000,000	6,932,067,331	67.69
Simpanan dari Bank Lain	5,050,000,000	5,450,000,000	107.92
Modal Dasar	20,000,000,000	20,000,000,000	100.00
Modal Disetor	10,000,000,000	11,800,000,000	118.00
Keterangan	Rencana Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase
Pendapatan Bunga	3,967,009,467	3,391,999,866	85.51
Pendapatan Operasional Lainnya	201,796,464	230,920,824	114.43
Beban Bunga	1,204,505,991	990,421,436	82.23
Beban PPAP Kredit	117,864,084	301,273,309	255.61
Beban operasional Lainnya	2,130,212,885	2,112,182,266	99.15
Laba Tahun Berjalan	546,501,623	221,495,445	40.53

Secara umum pencapaian realisasi Rencana Bisnis BPR Lumbang Mekar Fortuna untuk periode Semester II Tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan. Namun demikian pertumbuhan BPR dari sisi Aset maupun liabilitas Sebagian besar masih diatas rata-rata industri.

N. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. Tranparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Laporan Tahunan
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media sosial, website dan papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.



2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya. Sehubungan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- b. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk BPR;
- c. Menyampaikan Laporan Publikasi Laporan Tahunan kepada OJK dan lembaga lainnya, sesuai ketentuan.



O. Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola (Self Assessment)

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR												
Nama BPR	: PT BPR Lumbang Mekar Fortuna											
Posisi	: Semester 2 2024											
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai Faktor	2	2	2		2	2	2	1	2	1	3	2
Predikat Komposit	2											
Kesimpulan Akhir												
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.												
Faktor Positif												
Adapun kesimpulan Faktor positif (kekuatan) dari penerapan tata kelola tahun 2024 adalah sebagai berikut :												
Struktur :												
Secara garis besar BPR telah memenuhi ketentuan tata kelola sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah mengkinikan sebagian pedoman dan kebijakan secara berkala												
Proses :												
Proses tata kelola BPR telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku												
Hasil :												
Tidak ditemukan adanya pelanggaran seperti benturan kepentingan dan pelanggaran BMPK												
Faktor Negatif												
Adapun kesimpulan Faktor negatif (kelemahan) dari penerapan tata kelola tahun 2024 adalah sebagai berikut :												
Struktur :												
BPR masih berupaya untuk melengkapi kebijakan dan prosesur terkati tata kelola												
Proses :												
Belum sepenuhnya proses tata kelola dijalankan sesuai dengan ketentuan mengingat masih terdapat keterbatasan SDM												
Hasil :												
untuk kelengkapan tata kelola pada tahu 2024 BPR belum memiliki Pe APU PPT dan Fraud.												



Demikian laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna Periode Tahun 2024 disampaikan untuk dipergunakan dan diketahui dan sebagai bahan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Cilegon, 30 April 2025

PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna

Direksi,

Dwi Agus Budiarto
Direktur Utama



Sajaroh
Direktur Operasional Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan



PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan tata kelola di PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna yang telah disusun oleh Direksi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 9 Tahun 2024 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami selaku Dewan Komisaris PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR Lumbang Mekar Fortuna. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan tata kelola di PT BPR Lumbang Mekar Fortuna.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Cilegon, 30 April 2025

PT. BPR Lumbang Mekar Fortuna

Yangpi Laidi
Komisaris Utama

Eddy Susanto
Komisaris